

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian

No	Pertanyaan	Informan
Tahap Perencanaan		
Prinsip Akuntabilitas		
1	Bagaimana Bapak mengoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes?	Kaur Perencanaan
2	Apa langkah yang dilakukan untuk memastikan dokumen perencanaan lengkap dan siap dipertanggungjawabkan?	
3	Bagaimana Bapak mengawasi penyusunan APBDes yang dilakukan oleh perangkat desa?	Kepala Desa
4	Apa yang Bapak lakukan sebelum rancangan APBDes disahkan?	
Prinsip Transparansi		
1	Bagaimana Bapak menyampaikan rancangan APBDes kepada masyarakat?	Kepala Desa
2	Mengapa keterbukaan informasi pada tahap perencanaan sangat penting?	
3	Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi penjelasan mengenai pengelolaan dana desa secara jelas saat Musrenbangdes?	Masyarakat
4	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keterbukaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	
Prinsip Partisipasi		
1	Apakah masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan desa?	Masyarakat
2	Apa bentuk partisipasi Bapak/Ibu sebagai masyarakat dalam tahap perencanaan?	
3	Bagaimana desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan?	Kepala Desa
4	Apa tujuan pelibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa ?	
Tahap Pelaksanaan		

Prinsip Akuntabilitas		
1	Apakah seluruh penerimaan dan pengeluaran desa sudah dilakukan melalui rekening kas desa sesuai aturan yang berlaku?	Kepala Desa
2	Bagaimana Bapak/Ibu memastikan laporan belanja tak terduga disusun dan disampaikan tepat waktu kepada Bupati/Wali Kota?	
3	Bagaimana proses penyusunan laporan akhir realisasi kegiatan dan anggaran setelah suatu kegiatan selesai?	Kaur Keuangan
4	Apa langkah yang dilakukan untuk memastikan laporan tersebut sesuai kondisi sebenarnya di lapangan?	
5	Bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Desa termasuk bukti-bukti pendukungnya?	
6	Apa kendala yang biasanya ditemui dalam penyusunan laporan kegiatan di lapangan?	
Prinsip Transparansi		
1	Bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan laporan realisasi kegiatan kepada Kepala Desa secara terbuka dan lengkap?	Kaur Keuangan
2	Apakah laporan tersebut dapat diperiksa oleh pihak lain seperti BPD atau masyarakat jika diperlukan?	
3	Bagaimana Bapak/Ibu memastikan laporan realisasi kegiatan dari pelaksana kegiatan disampaikan secara jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi?	Kepala Desa
4	Apakah laporan tersebut kemudian diinformasikan atau dibagikan juga kepada BPD?	
5	Dari mana Bapak/Ibu biasanya mengetahui kegiatan yang sedang dilaksanakan desa?	Masyarakat
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa cukup terbuka dalam menyampaikan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan?	

Prinsip Partisipasi		
1	Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan dalam kegiatan swakelola atau gotong royong desa?	Masyarakat
2	Apakah masyarakat diberi kesempatan ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan?	
3	Bagaimana desa melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan swakelola?	Kepala Desa
4	Apakah desa selalu mengutamakan penggunaan material lokal dan tenaga masyarakat terlebih dahulu?	
Tahap Penatausahaan		
Prinsip Akuntabilitas		
1	Bagaimana Bapak/Ibu mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran di Buku Kas Umum agar tertib?	Kaur keuangan
2	Apa langkah tepat untuk memastikan setiap proses pembukuan tetap akurat dan lengkap?	
3	Bagaimana proses verifikasi laporan penatausahaan dari Kaur Keuangan kepada Sekertaris Desa?	Sekretaris Desa
4	Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika menemukan ketidaksesuaian dalam laporan?	
Prinsip Transparansi		
1	Apakah seluruh transaksi juga dicatat pada Buku Bank, Buku Pajak, dan Buku Pembantu lainnya?	Kaur keuangan
2	Apakah dokumen penatausahaan dapat diperiksa oleh pihak lain?	
3	Apakah desa cukup terbuka soal pencatatan keuangan kepada masyarakat?	Masyarakat
4	Apakah masyarakat dapat meminta informasi keuangan jika dibutuhkan?	
Tahap Pelaporan		
Prinsip Akuntabilitas		
1	Bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali Kota?	Kepala desa

2	Apa saja isi laporan pelaksanaan APBDes yang dilaporkan tersebut?	
3	Bagaimana proses penyusunan laporan realisasi APBDes?	Sekretaris desa
4	Apakah seluruh laporan diverifikasi sebelum nantinya disampaikan kepada Kepala Desa?	
Prinsip Transparansi		
1	Bagaimana desa menyampaikan laporan realisasi kepada masyarakat?	Kepala desa
2	Menurut Bapak, mengapa laporan keuangan perlu diumumkan terutama kepada masyarakat ?	
3	Apakah Bapak/Ibu pernah melihat laporan realisasi APBDes diumumkan?	Masyarakat
4	Apakah laporan tersebut mudah dipahami meski hanya dibaca sekilas saja tanpa lengkap secara keseluruhan?	
Tahap Pertanggungjawaban		
Prinsip Akuntabilitas		
1	Apa saja isi laporan pertanggungjawaban pada laporan APBDes?	Kepala desa
2	Bagaimana proses penyampaian Laporan Realisasi Anggaran kepada Bupati/Wali Kota?	
3	Apa tugas yang Bapak/Ibu lakukan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran?	Sekretaris desa
4	Bagaimana verifikasi laporan keuangan dilakukan oleh sekretaris desa?	
Prinsip Transparansi		
1	Bagaimana desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran kepada masyarakat?	Kepala desa
2	Apakah masyarakat biasanya melihat laporan tersebut?	
3	Apakah desa pepelegi mengumumkan Laporan Realisasi Anggaran setiap tahun sebanyak 2 semester?	Masyarakat

4	Apakah penyampaian Laporan Realisasi Anggaran dilakukan secara jelas dan mudah dipahami oleh anda sebagai masyarakat ?	
---	--	--

Lampiran 2. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban	Informan
Tahap Perencanaan			
Prinsip Akuntabilitas			
1	Bagaimana Bapak mengoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes?	Alhamdulillah proses penyusunan APBDes kami awali dengan mengumpulkan seluruh data dari RKPDes. Setelah itu saya mengoordinasikan masing-masing Kaur dan Kasi untuk menyusun kebutuhan sesuai bidangnya. Kami pastikan semuanya mengacu pada aturan, sehingga penyusunannya terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.	Kaur Perencanaan
2	Apa langkah yang dilakukan untuk memastikan dokumen perencanaan lengkap dan siap dipertanggungjawabkan?	Kami selalu mengecek kelengkapan setiap dokumen yang masuk. Jika ada kekurangan, saya minta diperbaiki terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Kepala Desa. Dengan begitu insyaAllah dokumennya rapi baik secara administrasi maupun substansi.	
3	Bagaimana Bapak mengawasi penyusunan APBDes yang dilakukan oleh perangkat desa?	Saya mengikuti prosesnya sejak awal dan memastikan Sekdes serta perangkat lainnya bekerja sesuai	Kepala Desa

		aturan. Alhamdulillah sejauh ini prosesnya berjalan baik dan tertib.	
4	Apa yang Bapak lakukan sebelum rancangan APBDes disahkan?	Saya melakukan pengecekan ulang, memastikan tidak ada anggaran yang tidak tepat atau kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan desa.	
Prinsip Transparansi			
1	Bagaimana Bapak menyampaikan rancangan APBDes kepada masyarakat?	Kami menyampaikan seluruh rancangan APBDes pada Musrenbangdes dengan bahasa sederhana agar masyarakat mudah memahami. Alhamdulillah masyarakat bisa mengikutinya.	Kepala Desa
2	Mengapa keterbukaan informasi pada tahap perencanaan sangat penting?	Supaya masyarakat mengetahui arah pembangunan desa dan ikut memahami prioritas program yang akan dijalankan.	
3	Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi penjelasan mengenai pengelolaan dana desa secara jelas saat Musrenbangdes?	Iya, penjelasannya cukup jelas dan kami bisa mengetahui rencana anggaran serta kegiatan desa.	Masyarakat
		Alhamdulillah, penjelasannya jelas dan runtut. Waktu itu mereka menunjukkan daftar kegiatan beserta anggarannya, jadi kami bisa tahu program mana yang menjadi prioritas tahun ini.	Masyarakat

		Menurut saya penjelasannya jelas karena perangkat desa menjelaskan satu per satu kegiatan yang direncanakan. Kalau ada warga yang tidak paham, mereka juga siap menjawab pertanyaan dengan sabar.”	Masyarakat
		Iya, saya merasa penjelasannya cukup mudah dipahami. Bahkan untuk warga yang tidak terlalu mengikuti urusan anggaran, informasi yang disampaikan tetap bisa dimengerti karena disampaikan dengan cara yang sederhana.”	Masyarakat
4	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keterbukaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Menurut saya desa sudah cukup terbuka karena mereka menjelaskan tanpa menutupi hal-hal penting.	Masyarakat
		“Sejauh ini desa sudah transparan. Waktu rapat mereka memaparkan rencana anggaran secara terbuka dan memberi kesempatan warga untuk bertanya atau memberi masukan.”	Masyarakat
		“Saya melihat pemerintah desa tidak menutupi apa pun. Informasi tentang kegiatan dan anggaran	Masyarakat

		disampaikan secara jelas, baik dalam rapat maupun melalui papan informasi.”	
		Bagi saya desa sudah transparan dalam hal perencanaan. Setiap ada kegiatan atau rencana anggaran, mereka selalu menjelaskan dan membuka kesempatan untuk warga yang ingin mengetahui lebih jauh.	Masyarakat
Prinsip Partisipasi			
1	Apakah masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan desa?	Iya, kami selalu diundang dan diberi ruang untuk memberi pendapat. Alhamdulillah beberapa usulan warga juga diakomodasi.	Masyarakat
		Alhamdulillah kami merasa dilibatkan. Setiap tahun desa mengadakan Musrenbangdes dan semua warga bisa datang. Walaupun tidak semua usulan langsung masuk, tapi setidaknya kami didengar.”	Masyarakat
		Iya, saya biasa ikut hadir dalam musyawarah perencanaan desa. Biasanya undangannya disampaikan lewat RT, dan warga dipersilakan menyampaikan pendapat. Alhamdulillah suasananya terbuka dan setiap orang	Masyarakat

		punya kesempatan berbicara.	
		Betul, saya dan warga lainnya dilibatkan dalam musyawarah. Pemerintah desa mengajak tokoh masyarakat, pemuda, dan ibu-ibu untuk hadir. Jadi semua lapisan bisa ikut berkontribusi.”	Masyarakat
2	Apa bentuk partisipasi Bapak/Ibu sebagai masyarakat dalam tahap perencanaan?	Kami menyampaikan kebutuhan warga, ikut berdiskusi dalam menentukan prioritas, dan memberi usulan kegiatan.	Masyarakat
		Biasanya saya menyampaikan kebutuhan lingkungan kami, seperti perbaikan jalan atau penerangan. Kami juga ikut berdiskusi menentukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.”	Masyarakat
		Partisipasi saya lebih ke memberi usulan yang kami rasa penting untuk warga. Kadang saya juga membantu menjelaskan kebutuhan kelompok atau dusun kami agar dipertimbangkan dalam perencanaan.”	Masyarakat
		Saya ikut terlibat dalam diskusi saat musyawarah dan menyampaikan apa	Masyarakat

		yang kami butuhkan. Selain itu, saya membantu mengumpulkan aspirasi dari tetangga untuk dibawa ke forum musyawarah.”	
3	Bagaimana desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan?	Kami mengundang tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan warga umum agar semua bisa berpendapat. Tidak hanya satu jenis saja yang kami undang, karena aspirasi dapat didapatkan darimana saja, kalangan apapun.	Kepala Desa
4	Apa tujuan pelibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa ?	Agar keputusan APBDes menjadi hasil bersama dan masyarakat dapat merasa memiliki pembangunan atas segala sesuatu yang desa kembangkan.	
Tahap Pelaksanaan			
Prinsip Akuntabilitas			
1	Apakah seluruh penerimaan dan pengeluaran desa sudah dilakukan melalui rekening kas desa sesuai aturan yang berlaku?	Alhamdulillah seluruh transaksi desa kami usahakan melalui rekening kas sehingga tertib dan dapat diawasi. Ini juga memudahkan proses pengecekan.	Kepala Desa
2	Bagaimana Bapak/Ibu memastikan laporan belanja tak terduga disusun dan disampaikan tepat waktu kepada Bupati/Wali Kota?	Kami langsung menyusun laporan begitu pengeluaran dilakukan. InsyaAllah selesai tepat waktu dan kami kirim sesuai ketentuan.	
3	Bagaimana proses penyusunan laporan akhir realisasi kegiatan	Setiap kegiatan selesai kami kumpulkan bukti-belinya dan nantinya akan	Kaur Keuangan

	dan anggaran setelah suatu kegiatan selesai?	langsung kami susun laporannya agar tidak ada data yang hilang atau terselip.	
4	Apa langkah yang dilakukan untuk memastikan laporan tersebut sesuai kondisi sebenarnya di lapangan?	Saya cek kembali bukti fisik dan konfirmasi ke pelaksana kegiatan agar laporan akurat dan sesuai. Karena jika tidak ada bukti fisik dan konfirmasi jelas, maka semuanya akan berantakan datanya.	
5	Bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Desa termasuk bukti-bukti pendukungnya?	Kami serahkan laporan beserta foto dan bukti pengeluaran setelah kegiatan selesai agar bisa langsung diperiksa.	
6	Apa kendala yang biasanya ditemui dalam penyusunan laporan kegiatan di lapangan?	Kadang pengumpulan bukti memakan waktu, tapi kami usahakan tetap tertib dan lengkap.	
Prinsip Transparansi			
1	Bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan laporan realisasi kegiatan kepada Kepala Desa secara terbuka dan lengkap?	Kami serahkan laporan beserta dokumen pendukung secara terbuka agar mudah diperiksa.	Kaur Keuangan
2	Apakah laporan tersebut dapat diperiksa oleh pihak lain seperti BPD atau masyarakat jika diperlukan?	Iya, laporan tersebut bisa diperiksa oleh pihak lain seperti BPD atau masyarakat selama memang sesuai dengan kewenangannya. Biasanya jika ada permintaan dari BPD, kami langsung menyiapkan dokumen laporannya untuk dicek	

		bersama. Untuk masyarakat, jika ada warga yang ingin mengetahui perkembangan kegiatan, kami juga bersedia memberikan penjelasan secara terbuka. Intinya, kami berusaha transparan supaya semua pihak dapat mengawasi jalannya kegiatan desa.”	
3	Bagaimana Bapak/Ibu memastikan laporan realisasi kegiatan dari pelaksana kegiatan disampaikan secara jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi?	Untuk memastikan laporan realisasi kegiatan disampaikan secara jelas, kami selalu meminta pelaksana kegiatan membuat laporan yang rinci, mulai dari progres pekerjaan sampai penggunaan anggarannya. Setelah itu, laporan tersebut kami periksa kembali kelengkapan datanya agar tidak ada bagian yang terlewat. Biasanya kami cek juga bukti fisik dan dokumentasi kegiatan. Dengan cara seperti ini, insyaAllah laporan yang diterima benar-benar transparan dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi.	Kepala Desa
4	Apakah laporan tersebut kemudian diinformasikan atau dibagikan juga kepada BPD?	“Iya, laporan realisasi kegiatan biasanya langsung kami sampaikan kepada BPD agar mereka bisa ikut memantau dan memastikan	

		semuanya berjalan sesuai ketentuan. BPD juga punya tugas pengawasan, jadi kami merasa penting untuk memberikan laporan tersebut kepada mereka. Dengan begitu, tidak hanya pemerintah desa yang mengetahui perkembangan kegiatan, tetapi BPD juga dapat memberikan masukan atau koreksi jika ada hal yang perlu diperhatikan.”	
5	Dari mana Bapak/Ibu biasanya mengetahui kegiatan yang sedang dilaksanakan desa?	Biasanya dari papan informasi atau pengumuman saat pertemuan warga”	Masyarakat
		“Biasanya saya mengetahui kegiatan desa dari obrolan warga di lingkungan sekitar	Masyarakat
		Saya sering melihat langsung kegiatan di lapangan. Misalnya kalau saya lewat jalan tertentu dan melihat ada pengerjaan, saya langsung tahu desa sedang melaksanakan kegiatan di situ. Jadi meskipun tidak diumumkan secara formal, kami bisa tahu dari aktivitas pekerjaanya.”	Masyarakat
		Kadang saya mengetahuinya dari grup WhatsApp warga yang dikelola perangkat desa.	Masyarakat

		Mereka biasanya menginformasikan kegiatan yang akan dimulai atau sedang berlangsung. Informasi seperti jadwal pengerjaan atau ajakan gotong royong sering muncul di grup tersebut, jadi kami selalu update.	
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa cukup terbuka dalam menyampaikan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan?	Menurut saya cukup terbuka karena warga juga bisa melihat perkembangan kegiatan langsung.	Masyarakat
		Menurut saya pemerintah desa cukup terbuka. Setiap ada pekerjaan atau kegiatan baru, mereka biasanya memberikan pemberitahuan, baik lewat pengumuman di balai desa maupun melalui perangkat desa di lapangan. Jadi warga bisa tahu apa yang sedang dikerjakan dan untuk tujuan apa.”	Masyarakat
		Iya, pemerintah desa sudah cukup transparan menurut saya. Kalau kami bertanya mengenai kegiatan yang sedang berjalan, mereka tidak sungkan menjelaskan dengan detail. Rasanya tidak ada hal yang ditutup-tutupi, sehingga kami sebagai warga merasa ikut mengetahui perkembangan desa.”	Masyarakat

		Perangkat desa cukup terbuka. Selain warga bisa melihat langsung perkembangan pembangunan, kalau ada kendala atau keterlambatan pun biasanya perangkat desa menyampaikan informasi tersebut. Jadi kami bisa memahami situasinya dan tidak salah paham.	Masyarakat
Prinsip Partisipasi			
1	Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan dalam kegiatan swakelola atau gotong royong desa?	Iya, warga sering diajak ikut gotong royong sesuai kemampuan masing-masing.	Masyarakat
		Iya, saya pernah dilibatkan saat desa mengadakan gotong royong perbaikan jalan lingkungan. Biasanya warga diminta membawa alat seadanya dan ikut membantu sesuai kemampuan. Kegiatannya cukup ramai dan Alhamdulillah berjalan lancar karena banyak warga ikut berpartisipasi.”	Masyarakat
		Pernah, terutama saat pembangunan saluran air beberapa waktu lalu. Desa mengajak warga ikut menurunkan tenaga untuk membantu pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa alat berat. Dengan adanya	Masyarakat

		swakelola begini, terasa sekali kebersamaan antar warga.	
		“Saya beberapa kali ikut gotong royong, misalnya membersihkan fasilitas umum atau membantu persiapan kegiatan desa. Menurut saya, swakelola seperti ini membuat warga merasa ikut memiliki pembangunan karena kami terlibat langsung.”	Masyarakat
2	Apakah masyarakat diberi kesempatan ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan?	Iya, kami boleh mengamati langsung dan memberi masukan.	Masyarakat
		Iya, masyarakat diberikan kesempatan untuk melihat dan mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung. Biasanya warga yang rumahnya dekat lokasi pembangunan bisa memantau langsung dan melaporkan jika ada hal yang dianggap kurang tepat.	Masyarakat
		Menurut saya, desa cukup terbuka dan kami sebagai warga diperbolehkan ikut memantau. Kalau ada yang ingin ditanyakan, perangkat desa biasanya menjelaskan dengan baik. Jadi masyarakat bisa	Masyarakat

		mengetahui progresnya secara jelas.”	
		Iya, masyarakat bisa ikut mengawasi, apalagi pekerjaan sering dilakukan di tempat yang mudah terlihat. Kami bisa melihat apakah pekerjaan sudah sesuai rencana, dan kalau ada masalah, warga bisa memberi masukan kepada pemerintah desa.”	Masyarakat
3	Bagaimana desa melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan swakelola?	Desa melibatkan masyarakat dengan mengajak warga ikut gotong royong secara langsung di lokasi kegiatan. Biasanya sebelum pekerjaan dimulai, kami mengadakan pertemuan untuk menjelaskan apa saja yang perlu dikerjakan dan siapa saja yang bisa terlibat. Selain itu, warga juga dilibatkan dalam tahapan kegiatan seperti persiapan material, pembersihan lokasi, hingga membantu pekerjaan yang tidak memerlukan tenaga ahli. Dengan cara ini, masyarakat merasa ikut memiliki hasil pembangunan karena	Kepala Desa

		mereka turut berkontribusi.”	
4	Apakah desa selalu mengutamakan penggunaan material lokal dan tenaga masyarakat terlebih dahulu?	Iya, sejauh mungkin desa selalu mengutamakan material lokal dan tenaga masyarakat. Selain untuk meningkatkan pemberdayaan warga, cara ini juga membantu perputaran ekonomi di desa. Menggunakan tenaga warga membuat mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan, sementara material lokal biasanya lebih mudah didapat dan lebih hemat biaya. Prinsipnya, kami ingin pembangunan berjalan sambil tetap melibatkan masyarakat secara langsung dan memberdayakan potensi yang ada di desa.”	
Tahap Penatausahaan			
Prinsip Akuntabilitas			
1	Bagaimana Bapak/Ibu mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran di Buku Kas Umum agar tertib?	Saya mencatat setiap transaksi pada hari yang sama agar tidak tertinggal. Pencatatan rutin ini memudahkan pemeriksaan.	Kaur keuangan
2	Apa langkah tepat untuk memastikan setiap proses pembukuan tetap akurat dan lengkap?	Saya cek kembali catatan dan menyocokkan dengan bukti transaksi supaya akurat.	
3	Bagaimana proses verifikasi laporan penatausahaan dari Kaur	Saya periksa bukti dan catatan, memastikan semuanya sesuai prosedur.	Sekretaris Desa

	Keuangan kepada Sekretaris Desa?		
4	Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika menemukan ketidaksesuaian dalam laporan?	Kami koordinasikan dan minta perbaikan agar laporan sesuai dengan laporan yang telah dilampirkan.	
Prinsip Transparansi			
1	Apakah seluruh transaksi juga dicatat pada Buku Bank, Buku Pajak, dan Buku Pembantu lainnya?	Ya, semua transaksi saya catat di buku pembantu agar transparan.	Kaur keuangan
2	Apakah dokumen penatausahaan dapat diperiksa oleh pihak lain?	Bisa, jika diperlukan kami siap menunjukkan datanya. Yang pasti akan memeriksa ya camat dan inspektorat.	
3	Apakah desa cukup terbuka soal pencatatan keuangan kepada masyarakat?	“Menurut saya terbuka karena informasi akan dijelaskan saat kita bertanya jika tidak paham.”	Masyarakat
		“Alhamdulillah, selama ini tidak terasa ada yang ditutupi. Informasi soal keuangan sering dijelaskan ketika ada rapat atau pertemuan warga.”	Masyarakat
		Saya rasa cukup transparan. Memang tidak semua data ditampilkan ke umum, tapi yang penting disampaikan secara garis besar sudah jelas.”	Masyarakat
		Sejauh yang saya lihat, desa cukup terbuka. Kalau ada kegiatan, anggarannya	Masyarakat

		juga diberitahu sehingga warga bisa mengikuti perkembangannya.”	
4	Apakah masyarakat dapat meminta informasi keuangan jika dibutuhkan?	bisa, selama itu memang boleh dibagikan. Pasti kami sebagai warga diberi kesempatan untuk melihat informasi keuangan, tentunya dengan tujuan yang jelas”	Masyarakat
		Saya pernah menanyakan soal dana kegiatan, dan perangkat desa langsung memberikan penjelasan.	Masyarakat
		Menurut saya bisa, asal bertanya dengan baik dan jelas tujuannya untuk apa. Perangkat desa memang terbuka kalau informasi itu boleh untuk umum	Masyarakat
		Selama ini perangkat Desa tidak terlihat menutup-nutupi perihal apapun, dan selama sesuai aturan, informasi keuangan akan diberikan.”	Masyarakat
Tahap Pelaporan			
Prinsip Akuntabilitas			
1	Bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali Kota?	Kami menyusun laporan dan mengirimkannya lewat kecamatan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan sesuai aturan	Kepala desa

2	Apa saja isi laporan pelaksanaan APBDes yang dilaporkan tersebut?	Laporannya meliputi realisasi pendapatan, belanja, dan kegiatan yang sudah dikerjakan.	
3	Bagaimana proses penyusunan laporan realisasi APBDes?	Saya kumpulkan semua data dari Kaur dan Kasi, lalu menyusunnya menjadi laporan.	Sekretaris desa
4	Apakah seluruh laporan diverifikasi sebelum nantinya disampaikan kepada Kepala Desa?	Iya, tentu kami cek bersama agar tidak ada data yang tertinggal satupun. Semuanya harus melewati tahap yang seharusnya	
Prinsip Transparansi			
1	Bagaimana desa menyampaikan laporan realisasi kepada masyarakat?	Kami selalu tempelkan di papan informasi dan sampaikan saat musyawarah. Sehingga masyarakat akan paham dan mengetahui laporan realisasi keuangan desa saat ini	Kepala desa
2	Menurut Bapak, mengapa laporan keuangan perlu diumumkan terutama kepada masyarakat ?	Oiya tentu wajib diumumkan, ini kan dana bersama, bukan dana pribadi saya. Jadi segala sesuatu harus dilaporkan. Tentunya agar masyarakat mengetahui perkembangan desanya seperti apa	
3	Apakah Bapak/Ibu pernah melihat laporan realisasi APBDes diumumkan?	Iya, saya lihat di balai desa. Terpampang dengan jelas laporan realisasi tahun yang sudah terlaksana sejumlah sekian juta”	Masyarakat

		“Iya, saya pernah melihat laporan realisasi APBDes yang ditempel di papan informasi balai desa. Biasanya dipasang pada akhir tahun atau setelah kegiatan besar selesai. Tampilannya cukup jelas, sehingga warga bisa mengetahui apa saja kegiatan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa.”	Masyarakat
		Pernah saya lihat waktu ada rapat desa. Sebelum rapat dimulai, perangkat desa menampilkan laporan realisasi lewat slide di layar. Dari situ saya bisa melihat kegiatan apa saja yang sudah selesai dan berapa jumlah anggaran yang digunakan.”	Masyarakat
		Iya, beberapa kali saya melihat laporan APBDes terpajang di depan kantor desa. Biasanya laporan itu langsung dibaca oleh warga yang lewat, termasuk saya. Menurut saya, cara ini cukup bagus supaya warga mengetahui pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.”	Masyarakat
4	Apakah laporan tersebut mudah dipahami meski	Cukup jelas karena ditulis dalam tabel. Mungkin jika	Masyarakat

	hanya dibaca sekilas saja tanpa lengkap secara keseluruhan?	tidak dalam bentuk tabel saya akan lebih kesulitan dalam membacanya	
		Menurut saya cukup mudah dipahami. Walaupun ada beberapa istilah keuangan, tapi penyajiannya memakai tabel sehingga lebih gampang dilihat. Minimal kami bisa tahu kegiatan apa yang sudah dikerjakan dan berapa anggarannya.”	Masyarakat
		Iya, meskipun dibaca sekilas tetap bisa dipahami. Biasanya laporan dibuat sederhana, misalnya ada kolom jumlah anggaran dan realisasi. Jadi meskipun tidak mengerti detail teknisnya, kami tetap mengerti maksudnya.”	Masyarakat
		Lumayan mudah dimengerti karena ditampilkan dalam bentuk ringkasan. Meskipun tidak semua warga memahami anggaran secara detail, tapi poin penting seperti kegiatan apa saja dan total belanja bisa terlihat jelas dari tabelnya.”	Masyarakat
Tahap Pertanggungjawaban			
Prinsip Akuntabilitas			
1	Apa saja isi laporan pertanggungjawaban pada laporan APBDes?	Isi laporan pertanggungjawaban APBDes biasanya	Kepala desa

		mencakup rincian realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Mulai dari kegiatan pembangunan, pemberdayaan, hingga belanja rutin desa. Selain itu, laporan juga memuat realisasi anggaran yang telah digunakan dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan. Di dalamnya terdapat informasi posisi kas akhir desa, sehingga terlihat dengan jelas sisa anggaran yang masih ada. Dengan begitu, pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana kepada masyarakat maupun pemerintah di atasnya secara transparan.”	
2	Bagaimana proses penyampaian Laporan Realisasi Anggaran kepada Bupati/Wali Kota?	Biasanya setelah laporan pertanggungjawaban selesai disusun dan diverifikasi di tingkat desa, kami menyampaikannya melalui kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kecamatan kemudian memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran dokumen sebelum diteruskan ke Bupati atau Wali Kota. Proses ini dilakukan secara	

		berjenjang agar laporan yang disampaikan benar-benar sesuai aturan dan tidak ada data yang terlewat. Alhamdulillah sejauh ini prosesnya berjalan lancar karena setiap tahapan kami ikuti dengan tertib.”	
3	Apa tugas yang Bapak/Ibu lakukan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran?	Peran saya dalam penyusunan LPJ adalah membantu mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan dari tiap-tiap Kaur dan Kasi, kemudian menyusunnya menjadi dokumen laporan yang rapi. Saya memastikan formatnya sesuai ketentuan dan semua lampiran termasuk bukti kegiatan ikut dilampirkan. Setelah itu, saya melakukan pengecekan awal sebelum laporan disampaikan ke Kepala Desa untuk ditinjau	Sekretaris desa
4	Bagaimana verifikasi laporan keuangan dilakukan oleh sekretaris desa?	Proses verifikasi dilakukan dengan mengecek satu per satu data yang masuk, mulai dari rincian kegiatan, realisasi anggaran, hingga bukti pendukungnya. Kami pastikan tidak ada selisih antara laporan dan kondisi sebenarnya. Jika ditemukan kekurangan, kami koordinasikan kembali dengan Kaur atau	

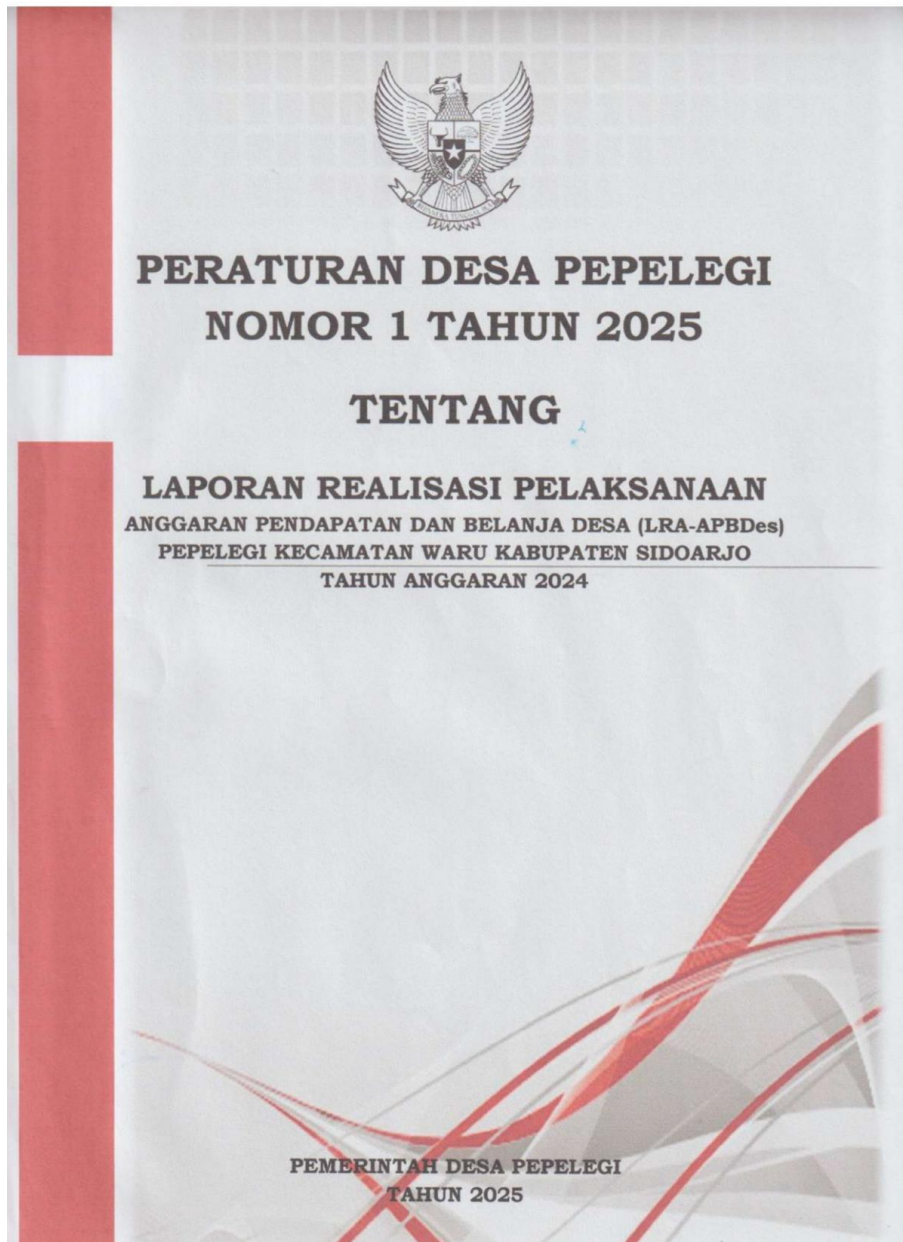
		pelaksana kegiatan untuk diperbaiki. Setelah semuanya lengkap dan sesuai, barulah laporan siap disampaikan ke tingkat kecamatan.”	
Prinsip Transparansi			
1	Bagaimana desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran kepada masyarakat?	Kami tempelkan di papan informasi dan paparkan saat musyawarah.	Kepala desa
2	Apakah masyarakat biasanya melihat laporan tersebut?	Alhamdulillah banyak warga yang ikut membaca. Sehingga laporan yang kami tampilkan tidak hanya menjadi pajangan sia sia	
3	Apakah desa pepelegi mengumumkan Laporan Realisasi Anggaran setiap tahun sebanyak 2 semester?	Iya, desa selalu mengumumkan LPJ setiap tahun. Biasanya dipasang di papan informasi balai desa dan disampaikan juga dalam rapat atau musyawarah. Jadi warga bisa melihat apa saja yang sudah dikerjakan selama setahun.”	Masyarakat
		Setahu saya, setiap akhir tahun pemerintah desa memang mengumumkan LPJ. Biasanya perangkat desa membacakan ringkasannya saat pertemuan warga sehingga kami bisa tahu perkembangan penggunaan anggaran.”	Masyarakat

		Iya, saya pernah lihat LPJ desa ditempelkan setiap tahun. Biasanya setelah seluruh kegiatan selesai, dokumen LPJ langsung dipublikasikan supaya masyarakat bisa membacanya.”	Masyarakat
		Benar, LPJ desa diumumkan rutin. Tidak hanya ditempel, tapi kadang juga dijelaskan oleh kepala desa saat acara desa sehingga warga lebih paham isi laporannya.”	Masyarakat
4	Apakah penyampaiannya Laporan Realisasi Anggaran dilakukan secara jelas dan mudah dipahami oleh anda sebagai masyarakat ?	“Menurut saya penyampaiannya cukup jelas. Laporan biasanya disusun dalam bentuk tabel dan ringkasan sehingga mudah dibaca meskipun tidak terlalu lama melihatnya.”	Masyarakat
		“Iya, jelas. Kepala desa atau perangkat desa sering memberikan penjelasan tambahan saat musyawarah sehingga warga yang belum paham bisa mengerti dengan mudah.”	Masyarakat
		Penyampaiannya sudah baik. Meskipun ada istilah yang agak teknis, tapi intinya tetap bisa dipahami, apalagi kalau ada warga yang bertanya, perangkat desa mau menjelaskan.”	Masyarakat

		Jelas kok. Informasinya disusun rapi dan tidak membingungkan. Kalau pun ada bagian yang kurang dimengerti, kita bisa menanyakan langsung kepada perangkat desa.”	Masyarakat
--	--	--	------------

Lampiran 3. Bukti Dokumen Aspek Perencanaan**1. Perencanaan**

**Dokumentasi : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
Desa Pepelegi**



Dokumentasi : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Pepelegi

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PEPELEGI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PEPELEGI TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.427.964.057,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.498.214.057,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	653.580.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	910.826.306,40	
5.3.	Belanja Modal	662.253.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	264.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.491.060.306,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.153.750,60	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.846.249,40	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.846.249,40	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	68.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	18.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(7.153.750,60)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PEPELEGI, 30 December 2023

KEPALA DESA

ISWAHYUDI, SE

Dokumentasi : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Pepelegi

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PEPELEGI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PEPELEGI TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.427.964.057,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.498.214.057,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.047.130.402,40</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	868.920.335,40	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	20.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	319.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	319.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.340.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.340.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)	136.862.605,40	PAD, PBH, PBK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.862.605,40	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	75.000.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	26.100.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.810.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.810.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.566.930,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.566.930,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	18.460.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.460.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	198.580.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	198.580.000,00	
1.1.93		Purna Bhakti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tali Asih BPD	20.000.000,00	PBH

Dokumentasi : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Pepelegi

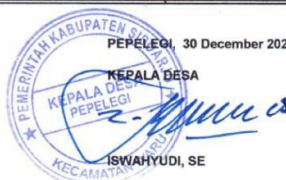
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	41.567.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.100.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.100.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.467.400,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.467.400,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.042.667,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.192.667,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.192.667,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.400.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.900.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.500.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.300.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.750.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	8.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	97.600.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	97.600.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.600.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	760.895.104,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.900.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	11.900.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	248.395.704,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	110.095.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.095.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	112.837.704,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.912.704,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.925.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	9.463.000,00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.463.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	16.000.000,00	DDS, PBH

Dokumentasi : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Pepelegi

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	358.678.900,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	135.223.100,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	135.223.100,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	19.668.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.668.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	188.787.800,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	188.787.800,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.658.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	30.658.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.096.000,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	29.562.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.650.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	14.650.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	96.612.500,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	96.612.500,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	96.612.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>92.938.600,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	53.013.600,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.750.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	49.263.600,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.263.600,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.750.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.750.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.175.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.175.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.175.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>325.696.200,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	9.350.000,00	
4.1.04		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	9.350.000,00	DDS
4.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
4.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.250.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	261.096.200,00	

Dokumentasi : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Pepelegi

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Dokumentasi Musrenbangdes Masyarakat Desa Pepelegi Kabupaten Sidoarjo



No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rp/ah)	Pengeluaran (Rp/ah)					Saldo Kas (Rp/ah)
					Belanja Pegawai	Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Tidak Tetap	Pengambilan ke Kas Desa (Rp/ah)	
1	04/12/2024	0208/SP/18.2001/2024	Pelaksanaan Pengeluaran Pembekalan Pemukiman	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
2	19/12/2024	0090/KW/18.2001/2024	Belanja Burang Cetak dan Pengendalian	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	19/12/2024	00902/KW/18.2001/2024	Belanja makan dan minum kegiatan pembedaan sampah	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
4	19/12/2024	00903/KW/18.2001/2024	Belanja makan dan minum kegiatan pola asuh anak dan remaja	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
5	19/12/2024	00904/KW/18.2001/2024	Belanja barisan bibit tanaman	0,00	0,00	1.181.000,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
6	19/12/2024	0003/SIS/18.2001/2024	Sisa Belanja Pelaksana dan Pengeluaran Pembekalan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Jumlah				5.350.000,00	0,00	3.181.000,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				5.350.000,00		3.181.000,00				2.169,00

PEPELEG, 31 December 2024

KAS PEPELEGAN

M. FADYASH RUSTOA

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

PEMERINTAH DESA PEPELEG KECAMATAN WARU

TAHUN ANGGARAN 2024

Dokumentasi :Bukti Surat Permintaan Pembiayaan (SPP)

PEMERINTAH DESA PEPELEGI KABUPATEN SIDOARJO																			
BUKTI PENCAIRAN SPP																			
Nomor Bukti	: 0234/BANK/18.2001/2024	Pembayaran	: Bank																
Tanggal	: 20 December 2024	Jenis SPP	: UM																
Dasar Pembayaran : SPP Nomor dan Tanggal : 0234/SPP/18.2001/2024 tanggal 19 December 2024 Uraian : Penyediaan Operasional BPD Bidang : 18.2001.01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Sub Bidang : 18.2001.01.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Kegiatan : 18.2001.01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makanan Minum, Pakaian Seragam, Listr Rencana Penggunaan Dana : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode Rek.</th> <th>Nama Rekening</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5.2.3.01.</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota</td> <td>500.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5.2.3.02.</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota</td> <td>12.200.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>12.700.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Jumlah Pembayaran : Rp. 12.700.000,00 Potongan Pajak : Rp. 0,00 Jumlah Dibayarkan : Rp. 12.700.000,00 Terbilang : Duabelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah				No	Kode Rek.	Nama Rekening	Nilai	1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00	2	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	12.200.000,00	Jumlah			12.700.000,00
No	Kode Rek.	Nama Rekening	Nilai																
1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00																
2	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	12.200.000,00																
Jumlah			12.700.000,00																
PEPELEGI, 20 December 2024																			
Pelaksana Kegiatan,  NUR FADHILLAH ROMADHONA		BENDAHARA  JAYATI PUTRI UTAMI																	

Dokumentasi : Pembangunan Selokan/Drainase

**Dokumentasi : pemberdayaan masyarakat dalam hal pertanian rapat bersama
petugas dinas pertanian**



Dokumentasi pemberdayaan masyarakat ibu -ibu PKK dan Posyandu



KECAMATAN	:	KECAMATAN WARU
KABUPATEN	:	KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI	:	PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Buket	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2024		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	61.094.655,49	0,00		61.094.655,49	61.094.655,49
2	25/11/2024		Saldo Pindahan				361.278.860,65	422.373.516,14
			Saldo Pindahan	4.239.052.361,71	3.877.773.501,06			
3	30/11/2024		Sisa Bebanja Penyelenggaraan Desa Suga Kesehatan				2.194.875,00	424.568.391,14
			Pengembalian Sisa Pengir	2.194.875,00	0,00	0094/SISMA/18.2001/2024		
4	30/11/2024		Sisa Bebanja Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana Pamiwasta					
			Pengembalian Sisa Pengir	203.310,32	0,00	0094/SISMA/18.2001/2024	203.310,32	424.771.701,46
5	30/11/2024		Sisa Bebanja Penyelenggaraan Desa Suga Kesehatan					
			Pengembalian Sisa Pengir	144.000,00	0,00	0057/SISMA/18.2001/2024	144.000,00	424.915.701,46
6	30/11/2024		Makan dan minum (PMN) balita stunting					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	306.000,00	0,00	00759/KWTF/18.2001/2024	306.000,00	425.221.701,46
7	30/11/2024		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Masruember					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00760/KWTF/18.2001/2024	30.000,00	425.251.701,46
8	30/11/2024		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	210.000,00	0,00	00765/KWTF/18.2001/2024	210.000,00	425.461.701,46
9	30/11/2024		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	31.102,00	0,00	00767/KWTF/18.2001/2024	31.102,00	425.492.803,46
			Pajak Restoran, Rumah Makan	155.516,00	0,00		155.516,00	425.648.319,46
	30/11/2024		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Masruember					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00768/KWTF/18.2001/2024	45.000,00	425.693.319,46

Dokumentasi : Bukti Pembantu Pajak

BUKU PEMBANTU BANK									
PEMERINTAH DESA PEPELEGI KECAMATAN WARU									
TAHUN ANGGARAN 2024									
BULAN : October 2024									
NAMA BANK : BANK BPR DELTA ARTHA									
NO. REC : 10510000938									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan			Pengeluaran		Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Pemakaian (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	29/10/2024	Produkhan Sdkto	-	2.266.098.062,49	11.807.392,68	2.076.465.460,00	7.639.146,00	0,00	193.801.439,17
2	31/10/2024	Bunga Tabungan Bulan October 2024	0022/BANK/18.2001/2024	0,00	190.863,53	0,00	0,00	0,00	193.992.302,70
3	31/10/2024	Tambahan Tunjangan / Tunjangan Keluarga / Tunjangan Penambah Kebutuhan / Uang Makan Kepala Desa	0170/SP/18.2001/2024	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	193.072.302,70
4	31/10/2024	Tambahan Tunjangan / Tunjangan Keluarga / Tunjangan Penambah Kebutuhan / Uang Makan Sekretaris Desa	0171/SP/18.2001/2024	0,00	0,00	10.620.000,00	0,00	0,00	182.452.302,70
5	31/10/2024	Pemeliharaan Gedung / Prasana Kantor Desa	0172/SP/18.2001/2024	0,00	0,00	1.578.950,00	0,00	0,00	180.873.352,70
6	31/10/2024	Jasa Petugas Makam / Modin (honorarium)	0173/SP/18.2001/2024	0,00	0,00	2.105.300,00	0,00	0,00	178.768.052,70
7	31/10/2024	Pemeliharaan Penanaman / Sius Berselarah / Petisian Milik Desa	0174/SP/18.2001/2024	0,00	0,00	1.579.000,00	0,00	0,00	177.189.052,70
8	31/10/2024	Potongan Pajak Honorarium petugas kebersihan kantor desa bulan October 2024	00689/KMT/18.2001/2024	78.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.268.000,70
9	31/10/2024	Potongan Pajak Honorarium modin lahi-lahi dusun Pepe bulan October 2024	00690/KMT/18.2001/2024	52.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.320.632,70
10	31/10/2024	Potongan Pajak Honorarium modin lahi-lahi dusun lsg bulan October 2024	00691/KMT/18.2001/2024	52.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.373.264,70
11	31/10/2024	Potongan Pajak Belanja jasa honorarium petugas kebersihan petisian bulan October 2024	00692/KMT/18.2001/2024	39.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.412.739,70
12	31/10/2024	Potongan Pajak Belanja jasa honorarium petugas kebersihan petisian bulan October 2024	00693/KMT/18.2001/2024	39.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.452.214,70
13	31/10/2024	Honorarium petugas kebersihan kantor desa bulan October 2024	0173/SP/18.2001/2024	0,00	0,00	0,00	78.948,00	0,00	177.373.266,70
14	31/10/2024	Honorarium modin lahi-lahi dusun Pepe bulan October 2024	0174/SP/18.2001/2024	0,00	0,00	0,00	52.632,00	0,00	177.320.634,70

Dokumentasi : Bukti Pembantu Pajak

**Lampiran 6. Bukti Dokumentasi Data Pendukung Aspek Pelaporan
Dokumentasi :Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pepelegi Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2024**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PEPELEGI TAHUN ANGGARAN 2024				
Realisasi s.d 31/12/2024				
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.250.000,00	54.500.000,00	3.750.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	18.250.000,00	14.500.000,00	3.750.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.793.369.828,00	2.793.369.828,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.352.231.000,00	1.352.231.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	704.466.884,00	704.466.884,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	436.671.944,00	436.671.944,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	14.211.505,98	(2.211.505,98)
4.3.6.	Bunga Bank	12.000.000,00	14.211.505,98	(2.211.505,98)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.863.619.828,00	2.862.081.333,98	1.538.494,02
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	670.173.175,00	669.305.944,00	867.231,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	88.450.000,00	88.290.000,00	160.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	501.220.000,00	500.520.000,00	700.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.511.575,00	2.504.344,00	7.231,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	77.991.600,00	77.991.600,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	932.948.702,40	870.705.513,00	62.243.189,40
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	445.109.502,40	418.907.423,00	26.202.079,40
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	218.254.200,00	216.485.800,00	1.768.400,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	117.180.000,00	92.020.000,00	25.160.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.625.000,00	10.425.000,00	2.200.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	123.830.000,00	118.971.790,00	4.858.210,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.950.000,00	12.714.500,00	235.500,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	3.000.000,00	1.181.000,00	1.819.000,00
5.3.	Belanja Modal	988.944.200,00	985.475.327,69	3.468.872,31
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al.	77.683.000,00	75.465.216,00	2.217.784,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	574.214.800,00	573.735.078,06	479.721,94
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	213.599.800,00	212.940.033,63	659.766,37
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	31.101.600,00	31.100.000,00	1.600,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	92.345.000,00	92.235.000,00	110.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	264.400.000,00	264.340.000,00	60.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	264.400.000,00	264.340.000,00	60.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.858.466.077,40	2.789.826.784,69	68.639.292,71
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.153.750,60	72.254.549,29	(65.100.798,69)
6.	PEMBIAYAAN			

**Dokumentasi :Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pepelegi Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2024**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.846.249,40	61.094.655,26	(248.405,86)
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.846.249,40	61.094.655,26	(248.405,86)
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(7.153.750,60)	6.905.344,74	(248.405,86)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	65.349.204,55	(65.349.204,55)



PEPELEGI, 31 December 2024

KEPALA DESA

ISWAHYUDI, SE

Dokumentasi : Laporan Realisasi APBDes 2024 dan APBDes Tahun 2025 dalam bentuk Papan Informasi (Baliho)



Lampiran 7. Bukti Dokumentasi Data Pendukung Aspek Pertanggungjawaban Dokumentasi : Laporan Realisasi APBDes Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PEPELEGI TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.250.000,00	54.500.000,00	3.750.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	18.250.000,00	14.500.000,00	3.750.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.793.369.828,00	2.793.369.828,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.352.231.000,00	1.352.231.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	704.466.884,00	704.466.884,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	436.671.944,00	436.671.944,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	14.211.505,98	(2.211.505,98)
4.3.6.	Bunga Bank	12.000.000,00	14.211.505,98	(2.211.505,98)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.863.619.828,00	2.862.081.333,98	1.538.494,02
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	670.173.175,00	669.305.944,00	867.231,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	88.450.000,00	88.290.000,00	160.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	501.220.000,00	500.520.000,00	700.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.511.575,00	2.504.344,00	7.231,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	77.991.600,00	77.991.600,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	932.948.792,40	870.705.513,00	62.243.189,40
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	445.109.502,40	418.907.423,00	26.202.079,40
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	218.254.200,00	216.485.800,00	1.768.400,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	117.180.000,00	92.020.000,00	25.160.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.625.000,00	10.425.000,00	2.200.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	123.830.000,00	118.971.790,00	4.858.210,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.950.000,00	12.714.500,00	235.500,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	3.000.000,00	1.181.000,00	1.819.000,00
5.3.	Belanja Modal	988.944.200,00	985.475.327,69	3.468.872,31
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	77.683.000,00	75.465.216,00	2.217.784,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	574.214.800,00	573.735.078,06	479.721,94
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	213.599.800,00	212.940.033,63	659.766,37
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	31.101.600,00	31.100.000,00	1.600,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	92.345.000,00	92.235.000,00	110.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	264.400.000,00	264.340.000,00	60.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	264.400.000,00	264.340.000,00	60.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.856.466.077,40	2.789.826.784,69	66.639.292,71
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.153.750,60	72.254.549,29	(65.100.799,69)
6.	PEMBIAYAAN			

Dokumentasi : Laporan Realisasi APBDes Lengkap Tahun 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.846.249,40	61.094.655,26	(248.405,86)
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.846.249,40	61.094.655,26	(248.405,86)
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(7.153.750,60)	6.905.344,74	(248.405,86)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	65.349.204,55	(65.349.204,55)

PEPELEGI, 31 December 2024
KEPALA DESA

ISWAHYUDI, SE



Dokumentasi : Musrenbangdes dalam rangka melaporkan laporan realisasi APBDes kepada Masyarakat



Lampiran 8. Mapping Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Penulis & Tahun	Hasil Temuan Utama
1	Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mata Air, Kupang Tengah)	Lowo, M. V. (2025)	Prinsip-prinsip good governance telah diterapkan, namun transparansi masih terbatas; laporan pertanggungjawaban belum diaudit secara rutin.
2	Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka	Nurisna & Sahade (2023)	Transparansi bersifat formal; akuntabilitas terkendala SDM; partisipasi masyarakat lebih bersifat simbolik.
3	Evaluasi Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuala Kuayan	Apriani, G. (2025)	Terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan; partisipasi masyarakat masih simbolis; transparansi dan akuntabilitas belum optimal.

No	Judul Penelitian	Nama Penulis & Tahun	Hasil Temuan Utama
4	Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro	Swasanti, I., Septian, E., & Aprilia, M. (2024)	Prinsip good governance meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun publikasi laporan keuangan belum detail.
5	Analisis Penerapan Good Governance pada Alokasi Dana Desa di Desa Hutapaung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan	Lumban Gaol, R. F., & Purba, I. R. (2024)	Transparansi dan akuntabilitas masih bersifat administratif; partisipasi warga rendah pada tahap pengawasan.
6	Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kampungbaru, Kediri	Zaman, B. (2020)	Upaya penerapan good governance sudah dilakukan, namun terkendala SDM dan sistem administrasi manual.
7	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jannah, F., & Ardiansyah, E. (2020)	Transparansi dan akuntabilitas cukup baik, namun realisasi anggaran tidak seluruhnya dipublikasikan.

No	Judul Penelitian	Nama Penulis & Tahun	Hasil Temuan Utama
	(Studi Kasus Desa Poto, Sumbawa)		
8	Akuntabilitas Tata Kelola Dana Desa (Studi Kasus: Pemerintah Desa Tepian Indah, Kutai Timur)	Suyudi, M., Amiruddin, & Rahmawati, I. (2023)	Perencanaan dan pelaporan sudah akuntabel, tetapi transparansi publik belum optimal.
9	Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tabir Barat, Merangin	Septiawati, A., Hizazi, A., & Mansur, F. (2021)	Akuntabilitas dan transparansi formal sudah ada, namun bukti fisik kegiatan sering kurang.
10	The Effect of Competence and Participation on Accountability in Village Fund Management	Suhardjo, Y., & Faisal, F. (2023)	Kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.
11	The Role of Community Participation, Accountability, and Transparency on the Effectiveness of Village Fund Management	Sofia, D., & Fitriyah, H. (2022)	Ketiga prinsip good governance berkontribusi positif terhadap efektivitas dana desa.
12	Community Empowerment through Management of Village Funds Allocation in Indonesia	Hermawan, E. (2023)	Dana desa lebih banyak diarahkan pada infrastruktur daripada pemberdayaan ekonomi.

No	Judul Penelitian	Nama Penulis & Tahun	Hasil Temuan Utama
13	The Impact of Community Participation in Village Fund Management on Fraud Prevention	Pratiwi, E. T., Haliah, Nirwana, & Kusumawati, A. (2024)	Partisipasi masyarakat aktif menurunkan risiko kecurangan; pentingnya audit sosial.
14	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan	Ruray, T. A., & Nur, S. M. (2022)	Transparansi dan akuntabilitas berjalan baik secara formal; perlu peningkatan inklusivitas masyarakat rentan.
15	Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Akuntabilitas dan Transparansi di Desa Ginggangtani, Grobogan	Rokhati, dkk. (2023)	Partisipasi masyarakat rendah; informasi publik belum detail.
16	The Level of Community Participation in Village Fund Management	Harefa, E. W. (2024)	Kesadaran masyarakat meningkat, namun keterlibatan masih rendah.

No	Judul Penelitian	Nama Penulis & Tahun	Hasil Temuan Utama
17	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Kedungrejo, Banyuwangi)	Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2024)	Supremasi hukum dan transparansi belum optimal; publik sulit mengakses data pemerintahan desa.
18	Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Desa Candiwates, Pasuruan)	Udzmah, Amalia, & Wicaksono (2022)	Pengelolaan dana desa sesuai Permendagri 20/2018, namun penyebaran informasi belum merata.
19	Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap	Aditiya, Syahara, & Suwandi (2022)	Pengelolaan sudah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah.

No	Judul Penelitian	Nama Penulis & Tahun	Hasil Temuan Utama
20	Pengelolaan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Jayanti, Kabupaten Tangerang)	Andrianita, C. (2024)	Prinsip good governance mulai diterapkan; transparansi publik belum optimal dan keterbatasan SDM menghambat efektivitas.
21	Accountability in Village Fund Management: A Qualitative Study of Transparency, Responsibility, Control, and Responsiveness in Tilango District, Gorontalo Regency.	Dauhi, K., Tohopi, R., Tui, F. P., & Badjuka, A. H. (2024).	Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tilango telah dilaksanakan sesuai prosedur administratif, khususnya dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Namun, akuntabilitas yang diterapkan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjamin ketepatan sasaran program pembangunan. Pelaporan lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal dibandingkan evaluasi manfaat program bagi masyarakat, sementara partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran masyarakat dan peningkatan transparansi informasi agar akuntabilitas pengelolaan Dana Desa bersifat substantif.

No	Judul Penelitian	Nama Penulis & Tahun	Hasil Temuan Utama
22	Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa: Analisis kasus dugaan penyimpangan di Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja.	(Panji Sion, Khanifah, Natali, & Wahyuni, 2025)	Meskipun prosedur administrasi dalam pengelolaan Dana Desa telah dipenuhi secara formal, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas masih bersifat administratif dan belum berdampak secara nyata pada pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran. Terdapat kesenjangan antara informasi yang disampaikan pemerintah desa dan pemahaman masyarakat, sehingga mekanisme pengawasan publik belum berjalan optimal. Penelitian merekomendasikan peningkatan keterlibatan masyarakat dan akses informasi keuangan yang lebih terbuka.

Lampiran 9. Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Pst 140&141 E-mail : feb@untag-sby.ac.id

SEMESTER
Gasal/ Genap

2025/ 2026

KARTU BIMBINGAN




Nama Mahasiswa / NBI : Cepkana Rozzi Rahmawati

Nama Pembimbing : Dr. I. B. Ketut Bayangkara, SE., MM, Ak., CIA, CSPA

Judul Skripsi : Analisis Good Governance Adm Dana Desa dalam
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Mulai Program Skripsi : Semester Thn. Ak Selesai Bimbingan Tanggal

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
01	16-09-2025	Judul	Acc	
02	30-09-2025	Proposal	Revisi	
03	01-10-2025	Proposal	Revisi	
04	08-10-2025	Proposal	Revisi	
05	10-10-2025	Proposal	Revisi	
06	14-10-2025	Proposal	Acc.	
07	12-11-2025	Bab IV	Revisi	
08	17-11-2025	Bab IV	Revisi	
09	19-11-2025	Bab IV	Revisi	
10	24-11-2025	Bab IV	Revisi	
11	26-11-2025	Bab V	Revisi	
12	28-11-2025	Bab V	Revisi	
13	01-12-2025	Bab IV & V	Acc.	

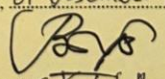
Perpanjang 1

Semester : _____

Th. Ak. : _____

Paraf Kajar : _____

Surabaya, 01 Desember 2025



Ida Bagus Ketut Bayangkara

(Nama dan tanda tangan Pembimbing)

Lampiran 10. Surat Ijin Penelitian



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAS) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN (S1)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI (S3)

TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Ext 140, 141, E-mail: feb@untag-sby.ac.id

Nomor : 2404/K/FEB/X/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Untuk Mengadakan Penelitian**
Kepada : Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Balai Desa Pepelegi di Sidoarjo.
Jl. Jatisari No.1, Legi, Pepelegi, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

Dengan hormat,

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (S1), maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan Skripsi sebagai hasil penerapan pelajaran teori serta praktek yang diperoleh berdasarkan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak / Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : SEPTIANA ROZZI RAHMAWATI
N. P. M : 1222200177
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / S1 Akuntansi
Alamat : Jalan Bambi Dukuh Menanggal No 40 Surabaya Jawa Timur
Telp./HP. 081336224164

Guna melakukan penelitian pada :

Balai Desa Pepelegi di Sidoarjo
untuk memperoleh data sesuai dengan Skripsi yang sedang disusunnya dengan judul
"ANALISIS GOOD GOVERNANCE DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEPELEGI KECAMATAN WARU
KABUPATEN SIDOARJO"

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 14/10/2025
Dekan,

Prof. Dr. Tri Ratnawati, MS, Ak. CA, CPA
NPP. 20220.85.0043

Lampiran 11 Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DESA PEPELEGI KECAMATAN WARU**

Jl. Jatisari No. 1 Pepelegi, Waru, Sidoarjo. Kode Pos 61256

Telepon. 0853 3333 1145

Email : pemerintahdesapepelegi@gmail.com Website : sidoarjokab.go.id

Nomor : 000.9/2/438.7.6.2/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran: =
Perihal : Ijin Penelitian

Sidoarjo, 21 Januari 2026

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Di _
Tempat.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 15 Januari 2026 Nomor 120/K/FEB/I/2026 perihal penelitian di Desa Pepelegi, dengan ini menerangkan

Nama : **SEPTIANA ROZZI RAHMAWATI**
N.P.M : 1222200177
Program Studi : S1 Akutansi
Alamat : Bambe Dukuh Menanggal, Surabaya
Judul Penelitian : Analisis Good Governance Dana Desa dalam
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Pepelegi Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo

Telah melaksanakan penelitian sejak bulan Oktober- Desember 2025 di Desa Pepelegi sebagai salah satu syarat kelulusan Ujian Strata Satu (S1)

Demikian jawaban ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA PEPELEGI



Ditandatangani secara elektronik oleh

ISWAHYUDI, SE
NIP. 3515181307660001

ISWAHYUDI, SE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRi sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Lampiran 12 *LoA* Artikel



No: 6463/LOA/JEBAKU/LPKD/XII/2025
Hal: Naskah Diterima

Kepada Yth.
Sdr/I Septiana Rozzi Rahmawati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan hormat,
Sehubungan proses telaah yang telah dilakukan oleh *reviewer* kami sesuai bidang kajian topik penelitian pada naskah yang telah didaftarkan, Dewan Penyunting/Editor Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi memutuskan dan menyatakan bahwa naskah Saudara berikut ini:

Judul naskah: **Analisis Tata Kelola Dana Desa Berbasis Good Governance dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pepelegi, Kabupaten Sidoarjo**
Kode naskah: JEBAKU/6463
Penulis 1*: Septiana Rozzi Rahmawati (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
Penulis 2: Ida Bagus Ketut Bayangkara (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

*correspondence author

DITERIMA

untuk diterbitkan di:

Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi

ISSN : 2827-8372 (daring); 2827-8364 (cetak)
Edisi terbit : Volume 6 Nomor 1 (Periode 2026) **
Status : Terakreditasi SINTA 5 (SK Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek RI No. 10/C/3/DT/05.00/2025, Tanggal 21 Maret 2025, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026)
Penerbit : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
URL : <https://journalshub.org/index.php/jebaku>

Kami ucapkan selamat atas diterimanya karya ilmiah Saudara untuk diterbitkan. Editor kami akan segera menghubungi Saudara untuk finalisasi proses *editing* dan *layout* naskah.
Atas perhatian dan kontribusi Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 12 Desember 2025

Editor in Chief



Aufa Rizka Azzumi, S.E.,M.A

**Apabila penulis mampu menyelesaikan perbaikan naskah berdasarkan masukan *reviewer* dan editor Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi sesuai tenggat waktu yang diberikan dan antrian publikasinya, naskah dapat diterbitkan paling lambat periode April dan Oktober 2025. Naskah dimungkinkan untuk terbit lebih cepat berdasarkan pertimbangan editor dan antrian terbit.

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran telah terindeks dan terdaftar di:



Lampiran 13 Hasil Turnitin

Analisis Tata Kelola Dana Desa Berbasis Good Governance dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pepelegi, Kabupaten Sidoarjo

ORIGINALITY REPORT

14%	9%	9%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	4%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	www.journal.unwira.ac.id Internet Source	1%
4	Hartina Husein, Dewi M Latue. "IMPLEMENTASI PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku)", Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi, 2022 Publication	<1%
5	Enggar Diah Puspa Arum, Reni Yustien, Fredy Olimsar, Edy Firza, Widya Sari Wendry. "Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Lolo Kecil Kabupaten Kerinci Menuju Good Village Governance", Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat, 2022 Publication	<1%
6	Regina Francina Pnielia Longdong, Jantje Tinangon, Stenly Kho Walandow. "Pengelolaan keuangan desa pada Desa Sea	<1%

Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa",
Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2025

Publication

7	journal.uinsi.ac.id Internet Source	<1 %
8	Bima Sujendra. "APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE DISTRICT GOVERNMENT IN RASAU JAYA SUB-DISTRICT KUBU RAYA DISTRICT", JURNAL BORNEO AKCAYA, 2017 Publication	<1 %
9	Novita Srikandi Gloria Gobel, Harijanto Sabijono, Victorina Z. Tirayoh. "Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Kanonang Satu", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2024 Publication	<1 %
10	Irma Nur Fadlia, Cholis Hidayati. "COMPLIANCE AUDIT ATAS PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI "X" BERDASARKAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE TERHADAP PEMENUHAN PKPU NOMOR 18 TAHUN 2023", Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 2025 Publication	<1 %
11	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
12	Atie Rachmiate, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam, Media and Education in the Digital Era", Routledge, 2022 Publication	<1 %

13	Ferdy Aldiansyah, Henny Andriyani Wirananda. "Analisis Penerapan Good Government Governance pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang)", Jurnal EMT KITA, 2025 Publication	<1 %
14	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	<1 %
15	Larasati Hamidah, Rido Parulian Panjaitan. "Penggunaan Dana Desa di Desa Tasik Juang Kabupaten Indragiri Hulu", Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen, 2021 Publication	<1 %
16	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1 %
17	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
18	ejurnal.swadharma.ac.id Internet Source	<1 %
19	lppipublishing.com Internet Source	<1 %
20	repository.fe.unj.ac.id Internet Source	<1 %
21	Annisa Desty Vambia, Efina Anastasya Septiana, Mario Sota Wijaya Purwanto Putra, Reyvaldi Rifqi Gunawan. "Evaluating Regulatory Compliance in Village Budgeting", The Accounting Journal of Binaniaga, 2025 Publication	<1 %

22	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
23	123dok.com Internet Source	<1 %
24	Agnia Nurul Huda, Indra Aditya Prayoga, Dewi Untari. "Manajemen Konflik Dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Bandung: Perspektif Administrasi Publik", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
25	Dewita Sophia Singon, Stanley Kho Walandouw, Wulan D. Kindangen. "Analisis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Di Desa Kiawa Satu Utara Kecamatan Kawangkoan Utara", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2025 Publication	<1 %
26	e-journal.umc.ac.id Internet Source	<1 %
27	ejournal.appisi.or.id Internet Source	<1 %
28	jadment.forindpress.com Internet Source	<1 %
29	www.scribd.com Internet Source	<1 %
30	Miranda Hutapea, Aprina Hapsari. "Does the Village Fund in The Middle of Pandemic COVID-19 Still Accountable and Transparent?", Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), 2021	<1 %

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 7 words

Exclude bibliography On